

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Kepanjen Telpon / Fax. (0341) 392024

Email: sekda@malangkab.go.id Website: http://www.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada

: Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Dari

: Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tanggal

: 14 Januari 2019

Nomor

: 976/ 193 /35.07.021/2019

Sifat

: Segera

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Laporan Hasil Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun

2018 di Kabupaten Malang

Menindaklanjuti Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Program/Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta memperhatikan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/142/KEP/35.07.013/2018 tentang Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018, bahwa tugas Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) antara lain melakukan koordinasi dalam rangka Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018 di Kabupaten Malang dapat dilaporkan dengan hormat hal – hal sebagai berikut:

A. Perencanaan

- Kabupaten Malang sebagai daerah penghasil cukai dan tembakau telah melaksanakan 5 (lima) program sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan memperhatikan komposisi minimal 50% untuk kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 dengan memperhatikan komposisi minimal 50% untuk kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada alokasi anggaran DBHCHT Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp73.641.430.000,- dengan alokasi mendukung program JKN pada 3 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang sebesar Rp37.385.356.100,- (50,77%) dan sisanya Rp36.256.073.900,- (49,23%) dialokasikan untuk Non JKN pada 10 OPD Pengguna DBHCHT, sedangkan SILPA DBHCHT dari Anggaran Tahun 2017 berdasarkan hasil Rekonsiliasi sisa DBHCHT s.d Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp12.194.011.215 dialokasikan untuk mendukung program JKN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.000.000.000,- dan untuk Non JKN pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp6.194.011.215,-, sehingga alokasi total untuk mendukung program JKN sebesar Rp43.385.356.100 (50,54%) dan Non JKN sebesar Rp42.450.085.115 (49,46%) dari Total anggaran setelah penambahan SILPA sebesar Rp85.835.441.215,-.
- 3. Selisih pencatatan antara Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp393.178.583,87,- yaitu SILPA yang berasal dari kegiatan Block Grant Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya tidak dianggarkan kembali di Tahun 2017, ditambahkan pada alokasi Dinas PU Bina Marga sehingga total alokasi Dana BHCHT pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp20.908.269.798,87.

B. Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan

- 1. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan pelaporan hasil Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DBHCHT Tahun 2018 pada bulan November Desember 2018 dengan melakukan sampling terhadap kegiatan Perangkat Daerah pengelola DBHCHT Tahun 2018 terutama terkait kegiatan pembangunan fisik, dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan yang menggunakan dana DBHCHT pada saat pengumpulan bahan pelaporan hasil kegiatan rata rata mencapai 100%, sebagaimana dokumentasi (terlampir 1)
- 2. Berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 pukul 08.30 wib yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Jl. Merdeka Timur Nomor 3 Malang, dihadiri oleh Perangkat Daerah Pengelola Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2018 (foto copy daftar hadir terlampir 2), dapat dilaporkan bahwa total realisasi anggaran DBHCHT per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp81.944.486.919,- dari total Anggaran DBHCHT Tahun 2018 (termasuk SILPA Block Grant 2016) sebesar Rp86.228.619.798,87 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	ALOKASI (Rp)	REALISASI	%	SISA
Dinas Kesehatan	19.719.464.595,00	17.150.906.000,00	86,97	2.568.558.595,00
RSUD Kanjuruhan	11.688.466.505,00	10.815.973.560,00	92,54	872.492.945,00
RSUD Lawang	11.977.425.000,00	11.741.451.679,00	98,03	235.973.321,00
Dinas PU Bina Marga	20.908.269.798,87	20.755.867.000,00	99,27	152.402.798,87
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	3.955.698.000,00	3.887.297.000,00	98,27	68.401.000,00
Dinas Komunikasi& Informatika	1.941.793.000,00	1.941.119.960,00	99,97	673.040,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.846.618.000,00	1.831.902.000,00	99,20	14.716.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2.400.000.000,00	2.293.376.000,00	95,55	106.624.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.425.000.000,00	2.395.000.000,00	98,76	30.000.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	1.715.884.900,00	1.704.049.850,00	99,31	11.835.050,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.000.000.000,00	6.805.776.370,00	97,23	194.223.630,00
Satpol PP	500.000.000,00	483.760.000,00	96,75	16.240.000,00
Bagian Adm. Perekonomian	150.000.000,00	138.007.500,00	92,01	11.992.500,00
JUMLAH	86.228.619.798,87	81.944.486.919	95,03	4.281.132.879,87

3. Menindaklanjuti disposisi Bapak Wakil Bupati tanggal 8 Januari 2019 pada Surat Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Januari 2019 Nomor 976/263/021.3/2019 Perihal Permintaan Laporan Program/Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) s.d Semester II Tahun Anggaran 2018 (foto copy terlampir 3), bahwa Penyampaian laporan realiasi Penggunaan DBHCHT s.d Semester II Tahun 2018 (31 Desember 2018) melalui Aplikasi edbhcht Provinsi Jawa Timur, dengan batas waktu penyampaian laporan melalui aplikasi paling lambat tanggal 15 Januari 2018, Adapun Laporan Realiasi Penggunaan DBHCHT Tahun 2018 adalah sebesar Rp81.559.048.919,- atau sebesar 95,02% dari total Alokasi sebesar Rp85.835.441.215,- (Alokasi definitif ditambahkan dengan SILPA DBHCHT Tahun 2017) sebagaimana draft Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Semester II Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Malang (terlampir 4).

C. Kesimpulan

- 1. Kabupaten Malang sebagai daerah penghasil cukai dan tembakau telah melaksanakan 5 (lima) program sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan memperhatikan komposisi minimal 50% untuk kegiatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Realiasi Penggunaan DBHCHT Tahun 2018 berdasarkan alokasi definitif dan SILPA DBHCHT Tahun 2017 adalah sebesar Rp81.559.048.919,- atau sebesar 95,02% dari total Alokasi sebesar Rp85.835.441.215,- sehingga sisa realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.276.392.295.
- 2. Terkait dengan draft Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Semester II Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Malang (terlampir 4), apabila Bapak Sekretaris Daerah telah berkenan mohon untuk mendapatkan tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

ASISTEN ADMINISTRASI T PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

> ABDUL KODIR, S.Sos., M.M Pembina Tingkat I NIP. 19700525 199803 1 011

<u>Disposisi pimpinan</u>: